

## **BAB II**

### **DINAMIKA KONFLIK TIONGKOK DENGAN TAIWAN (DARI MASA KEPEMIMPINAN MAO ZEDONG SAMPAI XI JINPING)**

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai dinamika konflik antara Tiongkok dan Taiwan melalui kepemimpinan lima generasi pemimpin Republik Rakyat Tiongkok yaitu dari kepemimpinan Mao Zedong selaku Ketua Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan sekaligus sebagai pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok sejak kemerdekaannya pada tahun 1949, kepemimpinan Deng Xiaoping, kepemimpinan Jiang Zemin, kepemimpinan Hu Jintao, dan yang terakhir adalah kepemimpinan Xi Jinping. Sebelum menjelaskan mengenai dinamika konflik antara Tiongkok dan Taiwan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah, akar, atau pemicu konflik diantara keduanya.

#### **A. Perang Saudara Tiongkok**

Pada awalnya, Tiongkok merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki yang mengharuskan pemimpinnya turun temurun dari generasi ke generasi dan sudah ada sejak ribuan tahun lamanya. Pada tahun 1911, ketika Tiongkok dipimpin oleh Dinasti Qing yang menganut sistem pemerintahan monarki, telah terjadi pemberontakan secara besar-besaran di wilayah Tiongkok untuk menggulingkan kepemimpinan Dinasti Qing yang dianggap telah menyebabkan Tiongkok mengalami kemerosotan. Pemberontakan ini disebut sebagai “Revolusi Tiongkok” atau “Revolusi Xinhai” yang dipimpin oleh Sun Yat Sen. Pada tahun 1912, Revolusi ini telah berhasil menggulingkan Dinasti Qing yang telah memimpin Tiongkok selama 267 tahun, juga sekaligus mengakhiri sistem monarki dan membuat kaum revolusioner memproklamkan Republik Tiongkok yang

menganut sistem pemerintahan republik serta menjadikan Sun Yat Sen sebagai presiden pertama (Teon, 2016). Ia merupakan tokoh nasionalis Tiongkok ternama yang memiliki cita-cita terhadap Tiongkok baru dengan didasarkan pada “Tiga Prinsip Rakyat” atau dalam bahasa Mandarin yaitu 三民主意 (pinyin: *Sānmín Zhūyì*) yang berisi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme (Sen, 1924).

Ditengah-tengah kepemimpinan Sun Yat Sen, mulai masuk paham komunis ke wilayah Tiongkok yang berasal dari Uni Soviet. Kemunculan paham Komunis ditandai dengan adanya Gerakan Empat Mei yang dipimpin oleh Chen Duxui. Gerakan ini digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan Komunisme di kalangan intelektual dan mahasiswa. Pada tahun 1921, Chen Duxui bersama dengan Henk Sneevliet, seorang Komunis asal Belanda, mendirikan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Tiongkok. Pada awal berdirinya, PKT hanya memiliki anggota yang berasal dari kaum intelektual dengan jumlah yang sangat sedikit dan tidak memiliki *power* apapun di Tiongkok. Hal ini kemudian membuat PKT berusaha melobi Sun Yat Sen agar memberikan izin kepada orang-orang Komunis untuk bergabung dalam birokrasi (Wicaksono, 2017).

Sun Yat Sen menyetujui permintaan dari PKT dan memberikan izin kepada orang-orang Komunis untuk bergabung ke dalam birokrasi pemerintahan yang dipenuhi oleh orang-orang Nasionalis. Bergabungnya orang-orang Komunis di dalam birokrasi tersebut juga sekaligus menjadikan mereka sebagai anggota Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) atau di Tiongkok dikenal sebagai *Zhongguo Guomindang*. Dengan bergabungnya orang-orang Komunis kedalam birokrasi pemerintahan, PKT semakin dikenal dan mendapatkan pengaruh di Tiongkok. PKT memanfaatkan keadaan tersebut dengan berusaha mempengaruhi dan menyebarkan paham

Komunis kepada orang-orang Tiongkok (Wicaksono, 2017).

Setelah meninggalnya Sun Yat Sen pada tahun 1925, Tiongkok kemudian dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang berasal dari KMT. Chiang merupakan seorang Jenderal yang juga menganut paham yang sama seperti pemimpin Tiongkok sebelumnya yaitu ideologi nasionalis. Dari awal Chiang memimpin Tiongkok, ia sudah menaruh kecurigaan terhadap PKT namun Chiang tetap bekerjasama dengan mereka melalui front persatuan sebagai bentuk aliansi diantara Nasionalis dan Komunis yang disebut *First United Front* yang sudah dibangun pada tahun 192. Melalui kerjasama tersebut, Chiang menggalakkan Ekspedisi Utara pada tahun 1926 bersama dengan Komunis. Ekspedisi ini bertujuan untuk memerangi para panglima militer yang membangkan dan berusaha menyatukan wilayah-wilayah dibawah kekuasaan KMT (Jordan, 1976).

Pada saat PKT dipimpin oleh Mao Zedong yang berasal dari keluarga petani kaya di Provinsi Hunan, paham Komunis semakin berkembang dan dikenal di wilayah Tiongkok serta orang-orang Komunis juga mendapatkan dukungan dari rakyat yang menjadikan PKT semakin kuat kedudukannya. Hal ini membuat Chiang semakin menaruh kecurigaan terhadap PKT bahwa mereka berencana untuk menguasai dan menjadikan Tiongkok sebagai negara yang menganut paham Komunis. Chiang tidak lagi mentolerir dan menganggap mereka sebagai ancaman bagi Tiongkok sehingga ia mulai melakukan pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang Komunis (FSUSD, 2019).

Upaya pembersihan ini dilakukan dengan mengusir orang-orang Komunis yang tergabung dalam KMT, memutuskan kerjasama dalam bentuk apa pun dengan PKT, dan penindasan terhadap PKT. Kejadian ini

membuat adanya ketegangan diantara kedua partai dan menimbulkan perpecahan di wilayah Tiongkok yang kemudian menyebabkan terjadinya Perang Saudara pada tahun 1927 dimana kedua partai sama-sama memerangi satu sama lain dan berusaha untuk menjadi penguasa di wilayah Tiongkok (FSUSD, 2019).

Pada akhir Maret 1927, terjadi pemberontakan dan pemogokan umum yang dipimpin oleh PKT di Shanghai (sebuah kota yang terletak di sebelah Timur Tiongkok). Hal ini direspon oleh KMT dengan menutup Biro Politik Shanghai (pemerintah kota sementara yang dibentuk oleh PKT) dan adanya darurat militer yang dideklarasikan oleh Chiang dengan alasan perlunya memulihkan ketertiban, menghentikan kekerasan spontan, dan mengakhiri pemogokan buruh liar. Sehingga pada tanggal 12 April 1927, Chiang bekerjasama dengan Geng Hijau Shanghai yang terkenal sebagai gangster di Shanghai untuk membersihkan orang-orang Komunis.

KMT dan Geng Hijau Shanghai menangkap ratusan Komunis, melakukan penyiksaan, dan sebagian besar dieksekusi atau dibunuh. Pada bulan berikutnya, terjadinya sebuah peristiwa yang dikenal dengan "*White Terror*" dimana KMT melanjutkan aksi pembersihan di Shanghai dan tempat-tempat lainnya yang menjadi bagian dari kekuasaan mereka. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut telah menewaskan sebanyak kurang lebih 5000 orang Komunis. Orang-orang Komunis yang selamat dari insiden tersebut berusaha untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam tanah atau melarikan diri ke daerah pedesaan dan daerah lain yang tidak dikuasai oleh KMT. Peristiwa ini sekaligus sebagai tanda telah berakhirnya aliansi antara KMT dan PKT dan sebagai titik awal terjadinya Perang Saudara di Tiongkok (Llewellyn, 2016).

Untuk membalas pembantaian Shanghai yang dilakukan oleh KMT, PKT dibawah kepemimpinan Mao Zhedong melakukan pemberontakan di Nanchang, Provinsi Jianxi, pada tanggal 1 Agustus 1927 dan sekaligus sebagai awal mula terbentuknya Tentara Merah yang kini dikenal sebagai *People's Liberation Army* (PLA) atau Pasukan Pembebasan Rakyat. Pemberontakan ini kemudian dikenal sebagai “Pemberontakan Nanchang”. Dalam pemberontakan tersebut, PKT melakukan perlawanan bersenjata yang ditujukan kepada KMT. Pada bulan Oktober, PKT juga melakukan pemberontakan di Provinsi Hunan (Selatan Tiongkok) yang dikenal sebagai “Pemberontakan Musim Gugur”. Dalam melakukan aksi pemberontakan, PKT merekrut para petani dan pekerja di daerah tersebut untuk menjadi anggota PKT dan melakukan pemberontakan. Pada akhir tahun 1927, PKT juga melakukan pemberontakan di Guangzhou (Selatan Tiongkok) yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, pembakaran, penjarahan, dan pembantaian. Meskipun demikian, usaha-usaha perlawanan yang dilakukan oleh PKT berhasil ditangani oleh KMT sehingga pada akhir tahun 1927 PKT hampir mengalami kehancuran karena kehilangan banyak anggota (Britannica, 2019).

Orang-orang Komunis yang selamat dari penyerangan Nasionalis mundur dan melarikan diri ke daerah yang jauh dari kekuasaan dan kekuatan KMT yaitu Tiongkok Tengah dan Pegunungan untuk memulai proses pembangunan pangkalan militer. Hal ini membuat PKT telah berhasil membangun 15 pangkalan militer di Tiongkok Tengah serta mendirikan Pemerintahan Republik Soviet Tiongkok yang disebut “Soviet Jiangxi” di Jiangxi (Selatan Tiongkok) pada tanggal 7 November 1931. Disana Mao Zedong selaku pemimpin PKT merekrut dan mengorganisir orang-orang Jiangxi yang sebagian besar merupakan para petani menjadi Tentara

Merah. Selama proses pelarian ini, KMT kemudian merencanakan pengepungan dan penyerang terhadap orang-orang Komunis di Jiangxi Soviet yang dinamakan sebagai *Five Encirclement Campaigns* (Kampanye Lima Pengepungan). Dalam pelaksanaannya yaitu selama tahun 1930-1933, KMT gagal melaksanakan empat pengepungan pertama karena berhasil diatasi oleh Mao dan pasukannya yang bertambah kuat. Dalam pengepungan yang terakhir pada bulan Oktober 1933, pasukan KMT berhasil menang melawan PKT (FSUSD, 2019).

Kekalahan yang dihadapi oleh PKT membuat Mao bersama dengan pasukannya memutuskan untuk melarikan diri dari Selatan menuju Utara Tiongkok dalam sebuah perjalanan panjang bernama "*Long March*" pada tanggal 16 Oktober 1934. Perjalanan ini awalnya mustahil untuk dilaksanakan karena jarak yang begitu jauh dan harus ditempuh dengan melewati beberapa provinsi seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. di bawah ini. Pada akhirnya Mao dan pasukannya berhasil meskipun PKT kehilangan sebagian besar anggotanya akibat tewas dalam perjalanan yang ditempuh selama 368 hari.

**Gambar 1.1.**  
**Rute "Long March"**



Sumber: (FSUSD, 2019).

Ditengah-tengah KMT berusaha memusnahkan PKT, Jepang kembali menguasai Tiongkok dengan menyerang Manchuria pada tahun 1931. Setelah berhasil menguasai wilayah Manchuria, Jepang membentuk rezim yang dikenal sebagai Manchukuo. Pada tahun-tahun berikutnya yaitu 1932-1935, Jepang juga merebut dan menguasai beberapa wilayah Tiongkok yang berbatasan dengan Manchuria. Hal ini membuat KMT menunda Perang Saudara karena merasa lebih terancam dengan tindakan Jepang dan pada tahun 1936 membentuk *United Front* antara Nasionalis dan Komunis untuk menghadapi agresi militer Jepang yang melakukan penyerangan terhadap Tiongkok. Kedua partai bekerjasama dalam perang melawan Jepang yang telah berlangsung sampai tahun 1945 ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II sekaligus menandakan berakhirnya Perang antara Jepang dengan Tiongkok (Wicaksono, 2017).

Berakhirnya Perang antara Jepang dengan Tiongkok lantas tidak mengakhiri perang antara Nasionalis dengan Komunis. Keduanya tetap melanjutkan Perang Saudara yang sempat ditunda untuk bersatu melawan invansi Jepang. Sepeninggalnya Jepang, Komunis menduduki bekas wilayah boneka Manchukuo bentukan Jepang yang digunakan sebagai basis kekuatan bagi PKT untuk melancarkan serangan balik terhadap KMT. PKT dibantu oleh Uni Soviet yang menyuplai Tentara Merah dengan persenjataan dan pelatihan militer sehingga membuat pasukan Komunis semakin kuat. Pada tanggal 1 Januari 1946, kembali dimulai kembali gencatan senjata antara kedua partai yang berlangsung sampai tahun 1949 dan dimenangkan oleh PKT sekaligus mengakhiri Perang Saudara antara Komunis dan Nasionalis yang telah berlangsung selama 22 tahun.

Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong selaku ketua PKT memproklamasikan kemerdekaan

Republik Rakyat Tiongkok (pemerintahan komunis) menggantikan Republik Tiongkok (pemerintahan nasionalis) sebagai bentuk kemenangan PKT melawan KMT. Sedangkan pada tanggal 10 Oktober 1949, Chiang Kai-Shek dan pasukannya harus mundur dan kabur dengan membawa pemerintahan Nasionalis yang masih tersisa ke sebuah pulau di Tenggara Tiongkok yang disebut sebagai Pulau Formosa atau sekarang dikenal sebagai Taiwan (Wicaksono, 2017).

## **B. Dinamika Konflik Tiongkok-Taiwan**

Setelah berakhirnya Perang Saudara antara Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-Shek dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang dipimpin oleh Mao Zedong, terdapat dua pemerintahan yang berdiri di wilayah Tiongkok yaitu pemerintahan Komunis bernama Republik Rakyat Tiongkok dengan ibukota di Beijing yang terletak di daratan Tiongkok dan pemerintahan Nasionalis yang bernama Republik Tiongkok atau Taiwan dengan ibukota di Taipei yang terletak terpisah dengan Daratan Tiongkok yaitu di sebelah pantai Tiongkok Daratan yang berbatasan dengan Selat Formosa atau Selat Tawian. Hal ini membuat hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan tidak baik bahkan hingga sekarang.

### **1. Masa Kepemimpinan Mao Zedong**

Mao Zedong merupakan pemimpin PKT dan sekaligus sebagai pemimpin Republik Rakyat Tiongkok sejak Negeri Tirai Bambu ini mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober 1949. Bagi Mao, Republik Rakyat Tiongkok merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah di wilayah Tiongkok dan Taiwan merupakan bagian dari wilayah kekuasaan pemerintahannya (Wicaksono, 2017). Sedangkan, Chiang Kai-Shek beserta pengikutnya yang kabur ke Pulau Formosa



atau yang dikenal sebagai Taiwan tidak mengakui sebagai bagian dari pemerintahan Komunis dan masih berusaha untuk mengambil alih wilayah Tiongkok. Hal ini menyebabkan hubungan kedua wilayah mengalami ketegangan hingga terjadinya penggunaan senjata antar satu sama lain pada sebuah insiden disebut Krisis Selat Taiwan.

Krisis Selat Taiwan pertama kali terjadi pada tahun 1954 dimana adanya konflik bersenjata antara Tiongkok dan Taiwan yang terjadi di Pulau Kinmen (juga dikenal sebagai Pulau Quemoy) dan Matzu yang terletak diantara keduanya. Pada awalnya, kedua pulau tersebut diduduki dan dikuasai oleh pemerintahan Nasionalis (Taiwan) yang digunakan sebagai basis pertahanan untuk merebut kembali Tiongkok Daratan dari pemerintahan Komunis (Tiongkok). Sehingga, Chiang memindahkan sebanyak 58.000 pasukan ke Pulau Kinmen dan 15.000 pasukan ke Pulau Matzu. Namun, apa yang dilakukan oleh Chiang dianggapi oleh Mao dengan tidak baik. Mao menganggap kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah kekuasaannya karena begitu dekat dengan Tiongkok yaitu hanya berjarak sekitar 8 mil dari lepas pantai Tiongkok (Global Security, 2011). Sehingga bagi Mao, pihak Nasionalis tidak berhak untuk menduduki pulau tersebut.

Pada tanggal 3 September 1954, Mao kemudian merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap pihak nasionalis yang menduduki Kinmen dan Matzu dengan mengerahkan sebanyak 150.000 pasukan militernya yaitu *People's Liberation Army* (PLA) untuk melakukan penembakan dan pemboman terhadap orang-orang Nasionalis yang ada di kedua wilayah tersebut. Hal ini merupakan awal mula terjadi Krisis Selat Taiwan

antara Tiongkok dengan Taiwan. Disamping konflik yang masih terjadi di kedua pulau tersebut, satu bulan kemudian PLA menjatuhkan bom-bom dari pesawatnya di Kepulauan Tachen yang juga diduduki oleh Taiwan. Pada tanggal 18 Januari 1955, PLA berhasil merebut Pulau Yijiangshan yang terletak di Utara Taiwan setelah mengalahkan pasukan Nasionalis disana (Matsumoto, 2012).

Pertempuran antara keduanya terus berlanjut hingga Amerika Serikat yang mendukung Taiwan memberikan ancaman terhadap Tiongkok bahwa ia akan menjatuhkan bom nuklir di wilayah kekuasaan Tiongkok jika mereka tidak menghentikan serangannya. Sehingga pada tanggal 23 April 1955, diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Konferensi ini merupakan sebuah upaya untuk membuat Tiongkok menghentikan penembakan terhadap kedua pulau yang diduduki Taiwan yaitu Pulau Kinmen dan Matsu serta mengakhiri krisis Selat Taiwan Pertama pada tanggal 1 Agustus 1955 (Wicaksono, 2017).

Tiga tahun kemudian setelah berakhirnya Krisis Selat Taiwan Pertama, pada tahun 1958 terjadi Krisis Selat Taiwan Kedua dimana konflik antara Tiongkok dan Taiwan kembali memanas karena pasukan Taiwan masih menempati Pulau Kinmen dan Matsu sehingga hal ini kembali memancing Tiongkok untuk melakukan penyerangan terhadap Chiang Kai-Shek dan pasukannya. Pada tanggal 23 Agustus 1958, PLA memulai serangan dengan menembaki sebanyak 40.000 peluru terhadap Pulau Kinmen yang sedang diselenggarakan upacara penyambutan terhadap Menteri Pertahanan Nasionalis Taiwan. Mao juga mengarahkan kapal-kapal milik Tiongkok memblokade Pulau Kinmen dan Matsu. Krisis kedua ini semakin diperparah

dengan adanya keterlibatan langsung pihak Amerika Serikat yang mendukung Taiwan dengan mengerahkan pasukannya untuk membalas serangan Tiongkok sehingga berhasil membuat Tiongkok meredakan serangannya (Halperi, 1966).

Pada pertengahan tahun 1960-an, internal Tiongkok sedang mengalami kerusuhan besar yang dikenal sebagai Revolusi Kebudayaan. Ditengah kekacauan tersebut, Chiang Kai-Shek berencana untuk menyerang Tiongkok melalui operasi “Rencana Keagungan Nasional”. Pada tanggal 1 April 1961, Chiang membangun markas besar di Cihu yang terletak di Provinsi Anhui (Sebelah Timur Tiongkok) untuk menangani rencana rahasia dalam merebut kembali wilayah Tiongkok dari pemerintah Komunis. Pada tanggal 6 Agustus 1961, Chiang juga mengerahkan kapal perang Angkatan Laut Taiwan yang mengangkut sejumlah pasukan khusus menuju perairan Tiongkok di Pulau Dongshan untuk melaksanakan operasi khusus yang bertujuan mengumpulkan informasi intelejen di Tiongkok. Namun, operasi ini gagal karena kapal mereka tenggelam dan menewaskan 200 prajurit akibat dari serangan yang dilakukan oleh Angkatan Laut PLA (Wicaksono, 2017).

Kegagalan operasi “Rencana Keagungan Nasional” tidak membuat Chiang menyerah untuk merebut kembali wilayah Tiongkok dari pihak Komunis sehingga pada bulan November 1965 Taiwan kembali mengerahkan kapal yang mengangkut pasukan Taiwan menuju Tiongkok. Namun, aksi ini berhasil ditangani oleh Mao Zedong dengan menembaki kapal tersebut (Wicaksono, 2017). Akibat dari kegagala-kegagalan yang dihadapi oleh Taiwan membuat mereka memutuskan untuk meninggalkan rencana perebutan kembali

wilayah Tiongkok. Sehingga, konflik antara Tiongkok dan Taiwan pada masa kepemimpinan Mao Zedong sedikit mereda karena tidak lagi adanya penggunaan kekuatan militer meskipun tidak menghilangkan ketegangan diantara keduanya.

## 2. Masa Kepemimpinan Deng Xiaoping

Setelah Mao Zedong wafat pada tahun 1976, Republik Rakyat Tiongkok dipimpin oleh Deng Xiaoping yang baru memiliki kekuasaan sepenuhnya sebagai pemimpin baru Tiongkok pada tahun 1978. Dibawah kepemimpinan Deng, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan tidak separah ketika dipimpin oleh Mao Zedong. Hal ini dikarenakan Deng meninggalkan kebijakan pembebasan Taiwan dengan kekerasan yang dilakukan Mao dan membentuk kebijakan baru yaitu *peaceful reunification*.

Melalui kebijakan ini, Deng mencoba membuka kembali hubungan dengan Taiwan dengan menawarkan sejumlah inisiatif damai. Seperti pada tanggal 30 September 1981, Tiongkok mengumumkan *Nine-Point Proposal* untuk menyelesaikan konflik diantara Tiongkok dan Taiwan. Pada tanggal 26 Juni 1983, Deng juga mengusulkan hubungan kerjasama antara PKT dan KMT dimana Deng menegaskan bahwa hubungan kerjasama ini bukan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pada tanggal 22 Februari 1984, Deng secara resmi mengumumkan model *One Country Two System* (Satu Negara Dua Sistem) sebagai bentuk *peaceful reunification* dengan Taiwan (Lijun, 2001).

*Peaceful reunification* yang ditawarkan oleh Tiongkok tidak menghilangkan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan karena Taiwan tidak menyetujui proposal kerjasama tersebut dengan

mengeluarkan sebuah kebijakan bernama “Tiga Tidak”. Kebijakan tersebut menekankan sikap Taiwan secara tegas terhadap Tiongkok bahwa tidak ada kontak, tidak ada kompromi, dan tidak ada negosiasi diantara keduanya (Sutter, 1998). Namun, Sikap Taiwan ini mulai berubah pada tanggal 3 Mei 1986 ketika terjadi pembajakan terhadap salah satu maskapai penerbangan milik Taiwan bernama *China Airlines* yang mengharuskan pesawat tersebut mendarat di wilayah Tiongkok. peristiwa ini membuat Taiwan terpaksa melakukan kontak dengan Tiongkok dengan mengirim utusan ke Negeri Tirai Bambu untuk membicarakan permasalahan tersebut (Wicaksono, 2017).

Hasil dari pembicaraan ini yaitu pesawat Taiwan dibebaskan dan dapat dipulangkan ke Taiwan sehingga ketegangan diantara Tiongkok dan Taiwan menurun karena Taiwan mulai melakukan kontak lainnya dengan Tiongkok seperti adanya kunjungan yang dilakukan oleh warga dari kedua pihak untuk bertemu dengan keluarga mereka. Meskipun demikian, wilayah yang diizinkan untuk dikunjungi oleh Taiwan adalah tempat-tempat netral seperti Hong kong, Jeju, dan Okinawa. Hal ini dilakukan Taiwan untuk menghindari pengakuan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok (Wicaksono, 2017).

### **3. Masa Kepemimpinan Jiang Zemin**

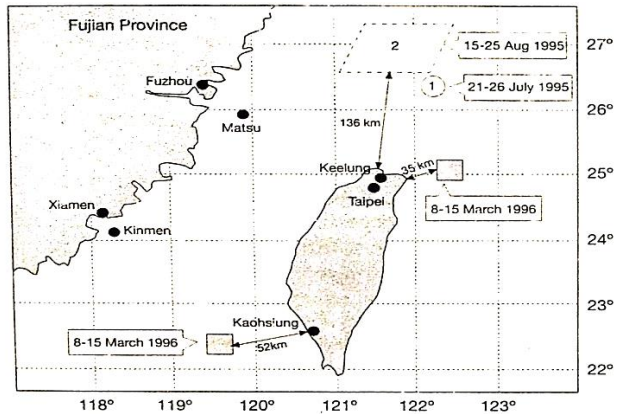
Jiang Zemin merupakan pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) sekaligus sebagai pemimpin Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setelah Deng Xiaoping wafat. Jiang sebenarnya mulai menjadi pemimpin sejak tahun 1989 yang ditandai pengangkatannya sebagai Sekretaris Jenderal PKT dan mengalami transisi suksesi dari tahun 1989-

1996. Jiang baru mengkonsolidasikan kekuasaannya pada tahun 1997 (Wu, 2017). Pada masa kepemimpinan Jiang, hubungan Tiongkok dengan Taiwan kembali menegang karena adanya pergesekan militer setelah sedikit diredahkan oleh pemimpin Tiongkok sebelumnya, Deng Xiaoping. Ketegangan ini ditandai dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh pemimpin Taiwan yaitu Lee Teng Hui di Universitas Cornell, New York, Amerika Serikat pada tanggal 22 Mei 1995 (Lijun, 2001).

Kunjungan yang dilakukan Lee bertujuan untuk memenuhi undangan dari Universitas Cornell sebagai alumnusnya dan melakukan pidato di hadapan kalangan akademisi. Hadirnya Lee dalam memenuhi undangan tersebut sebagai seorang presiden dimana secara tidak langsung mewakili Taiwan sebagai sebuah negara. Sehingga membuat Tiongkok kecewa, marah, dan sangat menentang kunjungan tersebut karena menganggap Lee berusaha memerdekakan Taiwan.

Jiang kemudian membatalkan sejumlah pertemuan yang direncanakan dengan Taiwan. Bahkan lebih parahnya lagi Tiongkok melakukan tindakan paling dramatis dengan meluncurkan uji coba rudal dan latihan militer di dekat Taiwan serta mengumpulkan pasukan di Provinsi Fujian dimana provinsi ini berdekatan langsung di seberang Selat Taiwan pada tahun 1995 sampai 1996 (Klintworth, 2000).

**Gambar 2.2.**  
**Uji Coba Rudal PLA (Juli dan Agustus 1995,**  
**Maret 1996)**



Sumber: (Lijun, 2001)

Uji coba rudal pertama kali dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 26 Juli 1995 di area Laut Utara Taiwan yang dilakukan oleh divisi ketiga *Second Artillery Corps of the People's Liberation Army*. Sejak bulan Juni, PLA telah melakukan 10 kali uji coba rudal dan latihan di Laut Tiongkok Timur dan Selatan yang hanya berjarak 50 km dari Pulau Pengchia Yu (salah satu wilayah Taiwan) dan 150 km dari Taipei.

Uji coba rudal dan artileri kedua dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 25 Agustus 1995 oleh PLA *Navy's East China Sea Fleet, The Navy Air Force, and The Second Artillery Corps* yang bertempat di Utara Taiwan berjarak 136 km seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. diatas. Pada tanggal 22 sampai 25 November 1995, PLA juga melakukan latihan amfibi di sekitar Pulau Dongshan (sebuah pulau yang terletak di selatan dua

pantai Selat Taiwan). Serangkaian Uji coba dan latihan ini dilakukan oleh Tiongkok sebagai bentuk peringatan dan ancaman terhadap Taiwan yang dianggap semakin jauh dari *One China Policy* (Lijun, 2001).

Pada tanggal 23 Maret 1996, Taiwan melaksanakan pemilihan umum multi-partai pertama untuk memilih presiden yang dimenangkan oleh Lee Teng Hui. Pemilihan ini berhasil membuat Lee kembali menjadi pemimpin Taiwan untuk kedua kalinya. Namun, pemilihan umum ini dianggap oleh Tiongkok sebagai aksi “memecah belah ibu pertiwi” karena bagi Tiongkok, Taiwan bersikap seolah sebagai negara independen yang berdaulat yang tentu saja sangat ditentang oleh Tiongkok (Wicaksono, 2017). Tiongkok kemudian kembali mengadakan pelatihan militer terbesar yang dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 25 Maret 1996 di lepas Pelabuhan Keelung dan Kaoshing seperti yang ditunjukkan pada *Gambar 2.2.* diatas.

Tiongkok juga melakukan latihan penembakan langsung yang dilaksanakan oleh PLA Angkatan Darat dan Angkatan Laut di dekat Pulau Penghu pada tanggal 12 sampai 20 Maret 1996. Hal ini karena Amerika membantu Taiwan dengan menempatkan kelompok pertempuran pembawa kemerdekaan di perairan internasional dekat Taiwan. Ketegangan juga meningkat pada tanggal 15 Maret 1996 ketika Beijing melakukan serangan amfibi simulasi yang direncanakan untuk tanggal 18 sampai dengan 25 Maret 1996 (Lijun, 2001).

Serangkaian aksi ini dilakukan oleh Tiongkok untuk mengingatkan kepada Taiwan bahwa Tiongkok tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan terhadap Taiwan kapanpun ketika keadaan memungkinkan dan memaksa mereka



harus melakukannya. Bahkan, ketika terjadi konfrontasi militer antara Tiongkok dan Taiwan sekalipun, Tiongkok akan mengambil langkah yang tegas dalam mengakhiri situasi yang tidak menguntungkan dalam waktu singkat.

Ancaman militer yang dilakukan oleh Tiongkok tidak berhasil membuat Taiwan patuh karena pada tanggal 9 Juli 1999, Lee Teng Hui memberikan pernyataan yang menentang bagi Tiongkok. Pernyataan tersebut menekankan hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan merupakan hubungan *state-to-state* yaitu hubungan antara dua pemerintahan dan aturan administrasi yang berbeda. Tiongkok menanggapi pernyataan tersebut dengan mengeluarkan *Second Taiwan White Paper* pada pidato kepresidennya tanggal 21 Februari 2002 yang dikenal dengan "*Three Ifs*". Dalam pidato tersebut, Tiongkok memberikan peringatan keras terhadap Taiwan bahwa Tiongkok akan menggunakan kekuatan militer jika Taiwan terus menolak negosiasi penyelesaian secara damai (Kan, 2014).

#### **4. Masa Kepemimpinan Hu Jintao**

Hu Jintao merupakan pemimpin generasi keempat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggantikan Jiang Zemin dengan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2002 dan Kepala Negara pada tahun 2003. Sama seperti Jiang, Hu juga mengalami transisi suksesi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Baru pada awal tahun 2006 Hu dapat mengkonsolidasikan kekuasaannya secara penuh (Wu, 2017). Ketika Tiongkok dipimpin oleh Hu, hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan pada awalnya membaik hal ini dikarenakan pada saat itu Taiwan dipimpin oleh Chen Sui Bian yang berusaha menjaga perdamaian di kawasan Selat Taiwan antara

Tiongkok dan Taiwan. Taiwan kemudian mengeluarkan kebijakan “*Five Noes*” atau Lima Pernyataan Tidak dengan disampaikan langsung oleh Chen pada tanggal 20 Mei 2000 yang berbunyi:

*“as long as the CCP regime has no intention to use military force against Taiwan, I pledge that during my term in office, I will not declare independence, I will not change the national title, I will not push forth the inclusion of the so-called “state-to-state” description in the Constitution, and I will not promote a referendum to change the status quo in regards to the question of independence or unification.”* (Kan, 2014).

Dalam pernyataan diatas menegaskan bahwa Taiwan tidak akan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan perpecahan antara Tiongkok dan Taiwan sehingga hubungan antar selat membaik selama kurang lebih empat tahun. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2005 ketegangan diantara keduanya kembali muncul karena Hu Jintao mengeluarkan Undang-Undang Anti Pemisahan yang dikenal sebagai *China’s Anti-Secession Law* yang disahkan pada Konferensi ketiga Kongres Rakyat Nasional dari Pemerintah RRT (Wei, 2010). Ada pun isi dari Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- Pasal 1, menentang dan memeriksa pemisahan Taiwan serta membela kepentingan nasional, kedaulatan, dan integritas teritorial Tiongkok;
- Pasal 2, mengartikan status quo lintas selat dengan cara yang lebih masuk akal dimana Taiwan dan Daratan Tiongkok merupakan

bagian dari satu Tiongkok dan kedaulatan ini tidak dapat dipisahkan;

- Pasal 3, masalah Taiwan merupakan masalah residual yang berasal dari Perang Saudara tahun 1940-an;
- Pasal 4, semua penduduk Tiongkok termasuk Taiwan harus mengusahakan penyatuan nasional;
- Pasal 5, prinsip *One China* merupakan dasar untuk penyatuan kembali secara damai;
- Pasal 6, membahas mengenai langkah-langkah yang akan diambil Republik Rakyat Tiongkok untuk bergerak ke arah hubungan yang disepakati dengan Taiwan seperti ekonomi dan lain-lain;
- Pasal 7, Tiongkok membuat konsesi penting terhadap Taiwan dengan menyatakan bahwa negosiasi dan konsultasi antara Tiongkok dan Taiwan harus dilaksanakan dengan pijakan yang setara dalam berbagai hal. Topik yang ditentukan untuk negosiasi sendiri mencakup penghentian permusuhan lintas selat, status politik Taiwan dan partisipasi internasional, serta pembangunan institusi untuk memfasilitasi penyatuan nasional;
- Pasal 8, Perang akan terjadi ketika salah satu dari tiga kondisi berikut ini dilakukan: kemerdekaan Taiwan tercapai, insiden besar yang memaksa pemisahan Taiwan dari Daratan Tiongkok, dan semua kemungkinan untuk reunifikasi secara damai telah sepenuhnya habis (Wei, 2010).

Undang-Undang ini dikeluarkan oleh Tiongkok untuk mengancam penggunaan militer terhadap Taiwan. Ancamana ini hadir sebagai respon

terhadap Taiwan yang pada saat itu kembali dipimpin oleh Chen Sui Bian kedua kalinya. Chen yang kembali terpilih memberikan sikap yang berbeda terhadap Tiongkok dari kepemimpinannya sebelumnya karena ia menjadi sangat ambisius dalam memerdekakan Taiwan. Dibawah kepemimpinan Chen yang kedua ini, Taiwan berusaha untuk menjadi negara yang independen dan menegaskan hubungannya dengan Tiongkok sebagai hubungan dengan negara asing. Tindakan yang dilakukan oleh Taiwan tersebut membuat Hu sangat marah hingga mengeluarkan *China's Anti-Secession Law* yang secara tegas mengancam penggunaan militer terhadap Taiwan (UNPO, 2017).

Bahkan, Hu sendiri telah mempersiapkan sejumlah pasukannya yaitu Tentara, Angkatan Darat PLA, dan Angkatan laut PLA, serta ribuan rudal yang diarahkan ke wilayah Taiwan dan siap ditembakkan kapan saja jika Taiwan tetap berusaha untuk mewujudkan kemerdekaannya. Meskipun telah diancam oleh Tiongkok, Taiwan mengabaikan peringatan Tiongkok dan pada tahun 2007 Taiwan mengajukan permohonan untuk bergabung kembali dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (UNPO, 2017). Namun, Hu berhasil mengagalkan upaya Taiwan untuk menjadi anggota PBB dengan mempengaruhi negara lain di dalam organisasi tersebut dengan *power* yang dimilikinya.

## **5. Masa Kepemimpinan Xi Jinping**

Xi Jinping merupakan pemimpin generasi kelima Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menjabat pada tahun 2012 ketika diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok dan sebagai Presiden Tiongkok pada tahun 2013. Xi merupakan pemimpin yang dikenal sangat agresif

dan ambisius. Bahkan, Xi dianggap sebagai *The Second Mao* karena memiliki kepribadian yang sama seperti pemimpin pertama Negeri Tirai Bambu. Hubungan lintas selat dibawah kepemimpinan Xi membaik dan tidak adanya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan. Hal ini dikarenakan pada saat Xi menjadi pemimpin Tiongkok, Taiwan dipimpin oleh seorang yang dikenal sangat pro terhadap Tiongkok, yaitu Ma Ying Jeou. Sehingga, adanya pemulihan hubungan antar Tiongkok dan Tawain setelah terus diwarnai dengan sejumlah ketegangan dari tahun ketahun sejak Tiongkok dikuasai oleh Mao Zedong (Muyard, 2010).

Selama kepemimpinana Xi Jinping pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, hubungan Tiongkok dengan Taiwan jauh dari adanya gesekan militer karena hubungan keduanya mengalami peningkatan dan membaik dengan adanya sejumlah kerjasama yang dilakukan antara kedua pihak khususnya kerjasama dalam bidang ekonomi. Hubungan damai antara Tiongkok dan Taiwan ini membuat kedua pihak begitu fokus dalam meningkatkan kerjasama ekonomi yang sangat menguntungkan bagi keduanya. Pada tahun 2015, Xi Jinping melakukan pertemuan dengan Ma Ying-Jeou sebagai pemimpin Taiwan. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kali sejak Negeri Tirai Bambu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1949 silam. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 7 November 2015 di Singapura dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara Tiongkok dan Taiwan serta sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan masala lalu yang tidak baik diantara keduanya (Phillips, 2015).

Hubungan damai antara Tiongkok dengan Taiwan yang telah terjalin empat tahun dibawah

kepemimpinan Xi Jinping mulai diwarnai dengan ketegangan ketika Taiwan dipimpin oleh Tsai Ing-Wen pada tahun 2016. Tsai berasal dari Partai Progresif Demokratik (PPD) Taiwan yang sangat pro terhadap kemerdekaan Pulau Formosa. Tsai dari awal pelantikannya sebagai pemimpin Taiwan mengemukakan bahwa ia akan berusaha untuk menciptakan perdamaian terhadap *Cross Strait Relation* dimana dari tahun ke tahun mengalami konflik yang naik turun. Meskipun demikian, pernyataan ini tidak mengarah kepada pengakuan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok atau Taiwan akan tunduk terhadap Tiongkok, melainkan Taiwan akan berusaha tidak tunduk terhadap Tiongkok melalui cara-cara yang damai (Kuo, 2019).

Disamping itu, Taiwan secara tegas telah memberikan penolakannya untuk mengakui konsensus 1992 karena mereka menganggap sebagai sebuah negara. Xi Jinping kemudian merespon sikap Taiwan dengan menyatakan penolakan secara tegas terhadap segala bentuk upaya untuk memerdekakan diri dari Tiongkok. Bahkan, Xi juga menegaskan keseriusannya dengan mengatakan bahwa Tiongkok akan melakukan kekerasan terhadap Taiwan (Kuo, 2019). Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan dibawah kepemimpinan Xi Jinping ini mengalami ketegangan yang tidak menemukan adanya penurunan karena Taiwan semakin bersikap menentang sebagai bagian dari Tiongkok dan Tiongkok yang menanggapinya dengan melakukan sejumlah peringatan dan ancaman terhadap Taiwan.